

# Interaksi India-Indonesia\*

K.N. RAMACHANDRAN

## I

India dan Indonesia merupakan dua negara terbesar di Asia. Interaksi banyak tingkat antara kedua negara itu berasal dari zaman dahulu. Ia terputus selama zaman penjajahan di kedua negara ini. Interaksi itu telah dibuka kembali pada tahap terakhir zaman penjajahan itu, pada awal abad ke-20 sebagai akibat faktor yang sama, yaitu pergolakan nasional di kedua negara. Proses ini mau tidak mau menyebabkan diketemukannya kembali ikatan-ikatan yang dijalin di masa lampau. Hal itu merupakan landasan yang kokoh untuk saling mengadakan interaksi pada tahap kemerdekaan kedua negara yang mulai pada akhir tahun empat puluhan abad ini. Kendatipun interaksi itu pada saat-saat tertentu ditandai oleh hal-hal yang menjengkelkan dan persepsi-persepsi yang keliru, jika kita membuat neraca maka terlihat bahwa secara keseluruhan hal itu menguntungkan kedua negara dengan kemungkinan-kemungkinan untuk berkembang secara tetap di masa yang akan datang.

## II

Tahap awal interaksi ini (1946-1960) secara jelas menunjukkan segi-segi nasionalis dan bangkitnya kesadaran pan-Asia dan Afrika kedua negara itu. Dukungan India untuk kemerdekaan Indonesia setelah dibentuknya pemerintahan sementara India (1946) pada Asian Relations Conference yang diadakan di New Delhi (Maret 1947) dan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, memproyeksikan sifat Asia nasionalisme India di arena internasional. Usaha yang dilakukan oleh Indonesia, bersama dengan India dan negara-negara Asia lainnya

---

\*Terjemahan makalah yang disampaikan pada Konperensi India-Indonesia IV, Jakarta, 19-21 Agustus 1985. Penerjemahnya Daniel SETYAWAN, staf CSIS.

yang baru muncul, untuk mengadakan Konperensi Asia-Afrika di Bandung (April 1955) berhasil menunjukkan segi-segi pan-Asia nasionalisme Indonesia. Segi bilateral interaksi itu tercermin pada: (a) perjanjian bantuan timbal-balik antara Angkatan Udara India dan Indonesia serta kerjasama yang dijalin Angkatan Laut kedua negara; (b) perjanjian untuk mengadakan dinas kurir dua bulan sekali antara kedua negara, dan (c) keputusan untuk menggalakkan perdagangan dan kerjasama.

Akan tetapi sejumlah hal yang menjengkelkan dan kesukaran timbul antara kedua negara itu dalam tahun enam puluhan dan baru setelah "Orde Baru" terbentuk menyusul penumpasan pemberontakan G-30-S (1965) interaksi itu dinormalisasi kembali.

Hal-hal yang menjengkelkan yang timbul sejak tahun 1960 adalah akibat beberapa faktor. India dan Indonesia berbeda persepsi mengenai sistem internasional dan cara-cara serta sarana untuk menyelesaikan persoalan dan masalah yang terdapat dalam sistem itu, terutama yang berhubungan dengan ancaman perang nuklir dan kecenderungan umum untuk mematikan aspirasi-aspirasi sah negara-negara Asia-Afrika yang baru muncul. Indonesia mulai menempuh jalan konfrontasi radikal yang akhirnya mengakibatkan negara itu keluar dari PBB (1965). Rezim Nasakom Soekarno, dengan mendapat dukungan kuat dari PKI yang sekarang sudah dibubarkan menempuh jalan yang berbeda dengan persepsi India mengenai tata internasional. Dipandang secara bilateral Indonesia menyesalkan yang dianggapnya sebagai sikap lunak India sehubungan dengan usaha Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat (1960-1961). Selanjutnya, Indonesia mengambil sikap netral terhadap konflik perbatasan Cina-India (1962) dan masalah-masalah yang berkaitan pada Konperensi Kolombo Negara-negara Non-Blok (Desember 1962) dalam mencari penyelesaian krisis itu. Bahkan sikap ini mengalami perubahan yang menguntungkan sikap Cina dalam tahun 1963 ketika berlangsung persekutuan Cina-Indonesia. Lagi pula Indonesia merasa bahwa India lebih mementingkan pertemuan non-blok kedua daripada konperensi Afro-Asia kedua -- yang merupakan usul Indonesia -- pada tahun 1963-1964 ketika masalah itu menjadi pusat perhatian. Indonesia juga mengambil sikap pro-Pakistan menjelang pecahnya Perang India-Pakistan tahun 1965 dan malahan menawarkan bantuan militer kepada Pakistan.

Di lain pihak, sekalipun sependapat dengan Indonesia mengenai perlunya diadakan perubahan-perubahan dalam sistem internasional, India berpendapat bahwa cara evolusi adalah yang paling tepat untuk hal itu karena perang nuklir antar negara adikuasa merupakan ancaman yang nyata -- suatu anggapan yang ditolak oleh Indonesia. Dari segi bilateral dan regional, India menganggap sikap Indonesia yang pro-Beijing (1963) dan pro-Pakistan (1965) keliru; demikian pula konfrontasinya terhadap Malaysia (1963-1965) suatu

tindakan yang mengganggu kestabilan kawasan Asia Tenggara di tengah-tengah suatu sengketa besar di Vietnam.

Masalah-masalah pokok itu telah dipaparkan di sini hanya untuk menekankan kenyataan bahwa pada tahap ini solidaritas tahun-tahun sebelumnya dirusak oleh bermacam-macam masalah dan sikap terhadapnya. Dalam hal Indonesia, faktor-faktor politik dan ekonomi dalam negeri juga memegang peranan penting.

### III

Berakhirnya konfrontasi terhadap Malaysia (1966) dan kembalinya Indonesia ke PBB melambangkan semangat baru. Pemberian prioritas kepada sektor pembangunan ekonomi yang terbengkalai, serta dipilihnya peranan pengembangan damai dalam sistem internasional, pada dasarnya menunjukkan arah Orde Baru. Faktor-faktor ini menciptakan iklim yang menguntungkan untuk penghayatan interaksi bilateral.

"Iklim" yang dimaksudkan di atas pada hakikatnya berarti melenyapkan perbedaan-perbedaan atau dissonansi yang tajam dalam pendekatan kedua negara terhadap pelbagai masalah dan faktor dalam sistem internasional. Negara-negara adikuasa, perlombaan senjata, politik Non-Blok, Samudra Hindia, Asia Tenggara, Cina dan Asia Selatan merupakan masalah-masalah dan faktor-faktor yang dimaksudkan.

*Pertama*, mengenai negara-negara adikuasa dan Sistem Internasional, sejak tahun 1966 India dan Indonesia banyak mengurangi perbedaan-perbedaan mereka sebelumnya. Kedua negara itu sekarang memandang pembicaraan serta perundingan negara adikuasa untuk mengendalikan perlombaan senjata dan menjamin stabilitas dunia sebagai suatu segi penting tata internasional dipandang perlu tetapi tidak cukup.

*Kedua*, India dan Indonesia sependapat bahwa perlombaan senjata merupakan suatu bahaya besar, dan bersama negara-negara non-blok lainnya mereka telah membantu menciptakan suatu iklim pendapat pro-perdamaian di PBB dan lain tempat. Pendekatan yang luas menuju perdamaian ini sangat mendesak karena, seperti dikatakan oleh Presiden Soeharto pada perjamuan makan untuk menyambut Presiden Fakruddin Ali Ahmed (26 Mei 1975): "Ketegangan-ketegangan dunia belum hilang sama sekali." Beliau menambahkan: "Jurang antara negara kaya dan miskin masih menonjol, ancaman perang terbatas masih menghantui kita, sebab-sebab potensial pelbagai krisis ekonomi belum disingkirkan seluruhnya, kompetisi serta perebutan daerah pe-

ngaruh masih merupakan duri dalam daging, kekerasan masih digunakan untuk memaksakan kemauan sendiri."

*Ketiga*, demikian pula dalam gerakan non-blok, kedua negara telah memainkan peranan yang positif karena baik India maupun Indonesia ikut mendirikan kelompok non-blok itu. Perbedaan-perbedaan mengenai arah gerakan itu memang timbul pada tahun enampuluhan ketika Presiden Soekarno menempuh jalan yang radikal. Sebaliknya Orde Baru telah memilih "prinsip muafakat," demikian pula India. Hal ini dapat dilihat pada sikap kedua negara terhadap masalah-masalah yang dihadapi pertemuan para Kepala Negara atau Pemerintah Non-Blok yang ke-6 di Havana (September 1979). Pemimpin delegasi Indonesia Wapres Adam Malik mengatakan bahwa tujuan negara ini adalah "memperkuat solidaritas non-blok, bukan melemahkannya; meningkatkan kemampuan kolektif gerakan untuk bertindak, bukan untuk menguranginya." Ia menambahkan: "Negara-negara luar telah memanfaatkan konflik-konflik intern kita dengan cepatnya untuk mendiskreditkan citra kita dan merusak kemampuan gerakan." Senada dengan ini Menlu India Shri S.N. Mishra berkata: "Marilah kita mengakui secara terus terang bahwa bahaya bagi gerakan kita tidak hanya berasal dari faktor-faktor luar, tetapi juga dari perselisihan-perselisihan bilateral dalam persaudaraan kita. ... Tekanan terhadap gerakan kita akan berlanjut ... tetapi kalau kita dapat bertindak dengan kematangan dan kebijaksanaan, bertindak bersama-sama seperti kita lakukan untuk mengakhiri penjajahan, kita dapat menjadikan gerakan non-blok sebagai motor untuk mendirikan tata dunia yang baru."

*Keempat*, kedua negara juga mempunyai persepsi yang sama mengenai peranan negara-negara besar di Samudra Hindia. Pandangan Indonesia adalah sama dengan pandangan India dalam arti bahwa kedua negara bertekad untuk menjadikan Samudra Hindia suatu zona perdamaian dan bahwa masalah-masalah keamanan regional harus ditangani oleh negara-negara pantai itu sendiri. Akan tetapi pemimpin-pemimpin Indonesia yang berpengaruh juga berpendapat bahwa kalau tujuan ini tidak dapat dicapai dalam waktu dekat, dapat dicapai "keseimbangan antara negara-negara adikuasa." Hal ini jelas berarti bahwa tidak satu pun negara boleh memainkan peranan yang dominan di Samudra Hindia -- kiranya sampai diadakan suatu perjanjian yang memungkinkan negara-negara adikuasa itu mengundurkan diri dari militerisasi.

*Kelima*, dalam hal Asia Tenggara, kedua negara ini tidak mempunyai perbedaan-perbedaan tajam mengenai masalah-masalah dan perkembangan di kawasan ini sejak lahirnya Orde Baru di Indonesia.

India menyambut baik pembentukan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada bulan Agustus 1967. Pada hakikatnya India meman-

dang ASEAN sebagai kerangka yang penting -- cukup luwes untuk mengusahakan konsultasi dan pembentukan konsensus dalam mencari penyelesaian masalah-masalah regional tanpa tekanan atau campur tangan luar dan sebagai sarana untuk menggalakkan kerjasama ekonomi regional. Pandangan India ini mirip dengan konsep Indonesia mengenai "Ketahanan Regional" -- suatu proses negara-negara anggota kelompok itu memperkuat diri melalui usaha-usaha individual dan kolektif.

Mengenai perkembangan-perkembangan lain di kawasan Asia Tenggara, Kampuchea merupakan suatu persoalan di mana perbedaan-perbedaan yang tajam telah timbul di masa lampau tetapi sekarang telah berkurang.

Perbedaan-perbedaan itu memang tampak ketika Kampuchea tampil sebagai akibat penggulingan pemerintahan Pangeran Norodom Sihanouk oleh Marsekal Lon Nol yang didukung oleh Amerika Serikat pada tahun 1970. Langkah ini merupakan sebagian dari usaha Amerika Serikat untuk memperluas peperangan sampai Kampuchea karena tempat-tempat perlindungan Viet Cong berada di perbatasan Kampuchea dengan yang waktu itu disebut Vietnam Selatan -- sebuah terminal jalan Ho Chi Minh yang terkenal itu. Meluasnya peperangan sampai ke Kampuchea mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengadakan suatu konperensi guna membahas masalah itu pada bulan Mei 1970. Sebelas negara menghadiri konperensi tersebut tetapi India tidak karena merasa bahwa sebuah konperensi negara-negara non-blok akan lebih tepat untuk itu. Tidak ikut sertanya India itu disesalkan oleh Indonesia.

Masalah Kampuchea muncul kembali menyusul pengakuan rezim Heng Samrin pada tahun 1980 oleh India -- rezim yang telah menggulingkan rezim Pol Pot yang membantai rakyatnya (yang mulai berkuasa pada tahun 1975) dengan dukungan kuat dari Vietnam. Sementara India maupun Indonesia tidak mempunyai rasa simpati terhadap rezim Pol Pot, perbedaan pendapat timbul mengenai keabsahan rezim Heng Samrin sehubungan dengan peranan Vietnam yang menentukan dalam menumbangkan kelompok Pol Pot.

Pengakuan rezim Heng Samrin oleh India berdasarkan beberapa faktor. Pertama, karena menguasai sebagian besar dari wilayah itu, maka rezim Heng Samrin memenuhi syarat bagi pengakuan India. Kedua, telah dikemukakan oleh beberapa kalangan, terutama di India, bahwa pengakuan India adalah suatu tindakan pro-Soviet, karena rezim Pol Pot adalah pro-Beijing dan dengan segala alasan praktis India tidak menjalin hubungan dengan rezim itu.

Argumen ini tidak benar karena India tidak melaksanakan politik diskriminasi dalam soal pengakuan kecuali dalam hal Afrika Selatan. Kenyataannya India telah lebih dahulu memberikan pengakuannya terhadap kekuasaan

Milton Obote yang telah menggulingkan rezim Idi Amin di Uganda dengan bantuan Tanzania yang menentukan. Dalam kedua hal itu, rezim-rezim pembunuh rakyat digulingkan dengan bantuan luar. Dalam kedua hal itu kebijakan India ditentukan oleh sifat pembunuh rakyat dari rezim-rezim tersebut.

Pada semuanya itu dapat ditambahkan bahwa Indonesia pun tidak menyetujui kebijakan berdarah kelompok Pol Pot serta hubungan eratnya dengan Beijing. Indonesia tidak mengakui rezim Heng Samrin rupanya karena tekanan-tekanan politik regional, yaitu solidaritas dengan ASEAN. Indonesia kenyataannya telah mengakui Pemerintah Koalisi Kampuchea Demokratik (CGDK = Coalition Government of Democratic Kampuchea) yang dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk dan dibentuk pada tahun 1981. Patut dicatat pula bahwa dalam melaksanakan pendekatan ini, Indonesia tidak bersikap keras (*hardliner*) terhadap Vietnam. Ia mempertahankan garis komunikasi dengan Vietnam karena memandang Vietnam sebagai pelaku yang merdeka, suatu benteng terhadap ambisi Cina di kawasan itu. Indonesia juga mempunyai keberatan-keberatan yang serius terhadap *Khmer Merah*, komponen pro-Beijing CGDK yang kuat, dan bersikap lebih simpatik terhadap Son Sann dan kelompok-kelompok Sihanouk. Dipandang dalam kerangka ini maka pendekatan-pendekatan Indonesia secara kualitatif berbeda dengan pendekatan keras terhadap Vietnam dalam kelompok ASEAN.

Dengan latar belakang ini maka posisi India dan Indonesia adalah sama mengenai diteruskannya dialog dengan Vietnam. Mereka juga sama dalam memilih jalan perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa di Kampuchea. Sebenarnya perbedaan hanya mengenai masalah pengakuan.

*Keenam*, persepsi kedua negara mengenai peranan Cina di kawasan Asia Tenggara khususnya dan di dunia pada umumnya juga sama. Meskipun politik luar negeri Cina sekarang ini mencari koeksistensi damai, kedua negara itu (India dan Indonesia) yakin bahwa Cina merupakan negara besar di kawasan ini dan berambisi untuk menjadi negara adikuasa di bidang militer, ekonomi dan politik. Dalam ulasannya mengenai politik koeksistensi damai Cina, Radio Jakarta (20 April 1985) mengatakan: "Prinsip koeksistensi damai diumumkan oleh almarhum Perdana Menteri Zhou Enlai pada Konperensi Asia-Afrika di Bandung tiga puluh tahun yang lalu. Hendaknya diingat bahwa setelah Konperensi Asia-Afrika itu, RRC mulai mengambil sikap yang bertentangan dengan prinsip koeksistensi damai dengan menyerbu India pada tahun 1962 dan Vietnam pada tahun 1979." Akan tetapi, ia menambahkan, bahwa Cina tidak mau menyerbu Vietnam untuk kedua kalinya menyusul ofensif besar-besaran Hanoi di Kampuchea baru-baru ini menunjukkan bahwa Cina bermaksud mendapatkan kembali kepercayaan negara-negara tetangganya di Asia akan prinsip koeksistensi damai sebagai salah satu prinsip pokok politik luar negerinya.

Akan tetapi perlu ditekankan bahwa peranan Cina sebagai kekuatan regional juga -- akan -- merupakan sumber ketidakpercayaan di Asia Tenggara karena bermacam-macam faktor, seperti persepsi bahwa Cina mengganggu stabilitas di masa lampau dan dukungannya yang aktif bagi pemberontakan-pemberontakan di kawasan ini (sekarang agak disembunyikan karena alasan-alasan praktis dan taktis) dan tujuan-tujuan jangka panjang negara itu. Lagi pula, masalah Cina Perantauan (OSC = Overseas Chinese) dan persoalan-persoalan mengenai kebangsaan mereka serta hubungan mereka dengan Daratan Cina dengan alasan-alasan ekonomi dan politik telah menimbulkan kekhawatiran di banyak negara Asia Tenggara. Kebijakan Cina sekarang ini untuk mendorong orang-orang Cina Perantauan yang kaya untuk menanamkan modalnya di RRC dan ikut memajukan keempat modernisasi agak mencekam karena negara-negara tersebut tidak menghendaki modal dialihkan keluar dari negara mereka masing-masing. Menurut pandangan India, masalah OSC itu merupakan bagian dari persoalan dalam negeri masing-masing negara yang harus diselesaikan oleh mereka sendiri, tanpa campur tangan atau tekanan luar mana pun. Indonesia pun telah menegaskan pandangan ini. Lebih penting lagi, seperti Indonesia, India pun merasa khawatir mengenai tujuan jangka panjang politik luar negeri Cina.

Peranan Cina mengganggu kestabilan di Indocina, khususnya usahanya memberi "pelajaran" kepada Vietnam (1979) dan ancamannya untuk memberi pelajaran yang kedua sejak itu, dukungannya kepada para pemberontak Kampuchea dari Pemerintah Koalisi Kampuchea Demokratik (CGDK) melawan rezim Heng Samrin, khususnya persekutuannya yang erat dengan *Khmer Merah* pemusnah bangsa dan komponen koalisi itu, merupakan masalah-masalah di mana India dan Indonesia mempunyai persepsi yang serupa walaupun tidak identik. Indonesia merasa simpatik terhadap kelompok Sihanouk dan Son Sann, tetapi mencurigai *Khmer Merah*. Selanjutnya India berpendapat bahwa sementara Vietnam adalah pusat kekuatan di Asia Tenggara, ia tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hegemoni apa pun di kawasan karena faktor-faktor geostrategis. Indonesia berpendapat. Hanya Muangthai merasa terancam karena berbatasan dengan Laos dan Kampuchea yang merupakan sekutu-sekutu Vietnam. Kekhawatiran Muangthai dapat dimengerti dan memang juga dirasakan oleh kelompok ASEAN. Apa pun faktor-faktor tradisional dan historis yang telah membentuk persepsi Muangthai terhadap Kampuchea dan sebaliknya, dewasa ini ketegangan-ketegangan telah timbul sebagian besar sebagai akibat terlibatnya Muangthai dalam sengketa Kampuchea dengan memberikan tempat-tempat perlindungan dan bantuan material kepada para pemberontak dengan dukungan Cina dan Amerika Serikat.

Dipandang dari segi ini, dapat dikatakan bahwa penyelesaian masalah Kampuchea bersama tindakan-tindakan untuk membangun kepercayaan oleh

negara-negara Indocina yang berpangkal pada perundingan dan persetujuan dengan Muangthai akan menciptakan kondisi yang perlu untuk menjamin keamanan Muangthai. Indonesia mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat ini. Akan tetapi sikapnya terhadap Vietnam, yang secara kualitatif berbeda dengan sikap Muangthai, Singapura, Pilipina dan lebih dekat dengan Malaysia, menunjukkan bahwa Indonesia juga percaya bahwa dalam jangka panjang keamanan regional hanya dapat dibangun berdasarkan persetujuan regional serta pembangunan saling kepercayaan, bukan dengan bantuan luar.

Masalah penting lain lagi yang telah menimbulkan kekhawatiran kedua negara berkenaan dengan kerjasama militer Cina-Amerika Serikat. Baik India maupun Indonesia, dengan cara yang berbeda, telah sampai pada kesimpulan bahwa boleh jadi Cina melihat perkembangan ini, dalam arti strategis, sebagai persetujuan Amerika Serikat yang tak diucapkan untuk mencapai tujuan regionalnya dengan kedok usaha melawan Soviet.

Dengan kata lain, terlepas dari kekhawatiran mengenai kegiatan negara-negara adikuasa itu, India dan Indonesia mempunyai persepsi yang sama mengenai tujuan dan maksud jangka panjang Cina yang merupakan negara tetangga dekat di kawasan ini. Akan tetapi, persepsi ini tidak menghalangi kedua negara ini mengadakan hubungan dengan Cina pada tingkat yang berbeda.

*Ketujuh*, persepsi kedua negara mengenai perkembangan di Asia Selatan, terutama mengenai peranan Soviet di Afghanistan, juga penting. Baik India maupun Indonesia menentang kehadiran militer negara asing, khususnya negara adikuasa, di suatu negara Non-Blok. Akan tetapi, titik berat kedua negara ini agak berbeda. India memandang masalah ini secara keseluruhan dengan memperhitungkan rangkaian sebab dan kejadian yang mengundang campur tangan Uni Soviet itu, dan banyak di antaranya berasal dari persepsi Uni Soviet mengenai aktivitas negara-negara lain. Pandangan Indonesia seperti disuarakan oleh media dan para pemimpinnya menunjukkan kritik dan keberatan-keberatan terhadap peranan Uni Soviet semata-mata. Namun, perlu dicatat bahwa apa pun isi penekanan masalah-masalah yang berkaitan dengan Afghanistan, sebagai anggota penting kelompok Non-Blok, kedua negara mendukung sebuah kerangka untuk mencari penyelesaian bagi masalah ini. Deklarasi politik yang telah disetujui KTT Non-Blok ke-7 di New Delhi pada bulan Maret tahun 1983 mendukung seruan Konperensi Menteri Luar Negeri Negara-negara Non-Blok yang diadakan pada bulan Februari 1981. Sambil mengulangi pandangan ini para kepala negara atau pemerintah menyerukan suatu "penyelesaian politik atas dasar penarikan mundur pasukan-pasukan asing dan hormat sepenuhnya terhadap kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan teritorial dan status non-blok Afghanistan serta pelak-



sanaan sepenuhnya prinsip non-intervensi dan non-campur tangan. Mereka juga menegaskan kembali hak para pengungsi Afghanistan untuk kembali ke rumah mereka dengan selamat dan hormat .... Mereka menyerukan kepada semua negara untuk mengendalikan diri agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan kawasan itu serta mengambil langkah-langkah yang sedemikian rupa sehingga akan menciptakan kondisi yang menjurus pada hubungan yang stabil dan harmonis antara negara-negara kawasan itu."

#### IV

Mengenai hubungan bilateral antara kedua negara ini, interaksi dan rasa persaudaraan semakin meningkat sejak berdirinya Orde Baru di Indonesia. Hal itu mulai secara resmi ketika Menlu Adam Malik mengunjungi India bulan September 1966. Suatu dorongan kuat diberikan ketika PM India Ny. Indira Gandhi mengunjungi Indonesia pada bulan Juni-Juli 1969. Konsolidasi lebih lanjut diusahakan ketika Presiden Soeharto mengunjungi India bulan Desember 1980. Pertemuan Menteri Luar Negeri tahunan yang terus-menerus diadakan antara kedua negara ini telah memberikan suatu kerangka kelembagaan yang efektif untuk membicarakan masalah-masalah bilateral dan global.

Beberapa persetujuan penting telah dicapai kedua negara itu sejak tahun 1970-an. Karena bidang perdagangan India-Indonesia dibahas secara terpisah, di sini dapat dicatat perkembangan di bidang-bidang lainnya.

Sebuah Memorandum Pengertian (Memorandum of Understanding) mengenai kerjasama di bidang ekonomi dan teknik ditandatangani pada bulan Februari 1979 di New Delhi sebagai tindak lanjut dari kunjungan Biju Patnaik, Menteri Urusan Baja dan Pertambangan India, ke Indonesia sebelumnya. Suatu perjanjian kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ditandatangani oleh kedua negara pada bulan Februari 1982 di Jakarta. Sebenarnya Menteri Luar Negeri Indonesia Mochtar Kusumaatmadja telah mengatakan bahwa perjanjian itu "melambangkan kerjasama dalam kerangka kerjasama di bidang teknologi antara negara-negara berkembang untuk mempercepat terwujudnya tata ekonomi internasional baru." Mungkin perlu pula dikemukakan bahwa kedua negara telah mempunyai perjanjian mengenai kerjasama dalam bidang penggunaan tenaga atom secara damai.

Kejadian-kejadian penting pada tahun-tahun belakangan ini menunjukkan bahwa kemajuan telah dicapai dalam interaksi (hubungan) bilateral. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan. Kendati adanya perjanjian-perjanjian semacam itu, pengetahuan dan pengertian satu sama lain an-

tara kedua negara mengenai lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan dan bidang-bidang pengambilan keputusan lain yang penting masih harus melintasi tahap tinggal landas. Alasan-alasan kecenderungan ini harus dilihat pada tidak adanya jalinan-jalinan bilateral banyak tingkat yang intensif dan luas. Membangun jalinan-jalinan semacam itu harus menjadi tugas kedua negara dalam bagian kedua dasawarsa 1980-an ini dengan maksud untuk memperkuat dan memajukan hubungan bilateral yang saling menguntungkan antara India dan Indonesia. Menyambut kedatangan Presiden Soeharto di India pada tanggal 1 Desember 1980, Presiden India waktu itu, Sanjeeva Reddy, menekankan pendekatan ini ketika ia mengatakan: "Kita akan tetap berusaha menemukan bidang-bidang kerjasama yang baru dan saling menguntungkan dan mengambil inisiatif untuk menyusun program-program baru di pelbagai lapangan sehingga hubungan kita yang meningkat dapat menjadi suatu model kerjasama antara negara-negara berkembang."